



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**
Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243
☎ 024-8311174 ext. 288 Fax. 024-8311183
✉ biro_perekonomian6@gmail.com

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii - iii
LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
1. BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	1
1.3. Isu – Isu Strategis	7
1.4. Kedudukan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran	8
1.5. Sistematika.....	9
1.6. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	12
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja OPD.....	13
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	16
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2 Realisasi anggaran	32
3.3 Inovasi	33

3.4 Penghargaan	33
4. BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Rekomendasi	35

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja
RKT

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.4.1 : Data Pegawai Biro Perekonomian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.4.2 : Data Pegawai Biro Perekonomian Berdasarkan Jabatan.....	8
Tabel 2.1 : RPJMD	14
Tabel 2.2 : Renja	14
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja	15
Tabel 3.1 : Interval Nilai Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.3 : Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.4 : Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	20
Tabel 3.5 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024	21
Tabel 3.6 : Perbandingan realisasi kinerja dengan target Akhir RPJMD	21
Tabel 3.7 : Analisis Penyebab Keberhasilan	22
Tabel 3.8 : Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	23
Tabel 3.9 : Analisis program yang menunjang keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	24
Tabel 3.10 : Tabel capaian anggaran program dan kegiatan.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2.1 : Peta Proses Bisnis Biro Biro Perekonomian	5
Gambar 1.2. 2 : Struktur Organisasi Biro Perekonomian.....	7
Gambar 2.4.1 : Aplikasi Pendukung Kinerja.....	16
Gambar 3.1.1 : FGD Sinergi Stakeholder Dalam Rangka Pemanfaatan Bandara Jenderal Soedirman Untuk Perjalanan Umrah di Wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga,Banyumas, Cilacap, Kebumen)	25
Gambar 3.1.2 : FGD Penguatan Manajemen Pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Era VUCA Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity)	25
Gambar 3.1.3 : FGD "Sinergi Kawasan dan Industri Pariwisata Mendukung DPSP Borobudur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas di Jawa Tengah" Bertempat di Setda Kab. Magelang Tanggal 28 Februari 2023.....	26
Gambar 3.1.4 : Pengukuhan KDEKS oleh Bapak Wakil Presiden RI di Alun – Alun Masjid Agung Kauman Semarang	27
Gambar 3.1.5 : Rakor dalam rangka Capacity Building TPID Provinsi Jawa Tengah	27
Gambar 3.1.6 : Rapat Koordinasi Kegiatan Tahun 2023 dengan Dinas Koperasi dan UKM	29
Gambar 3.1.7 : FGD Pengembangan & Inovasi Industri Halal Jawa Tengah di Tlogo Resort Tuntang	29
Gambar 3.1.8 : Kunjungan lapangan terkait Pendirian BLUD	29
Gambar 3.1.9 : Pelaksanaan FGD percepatan perubahan Perda penyehatan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten	29
Gambar 3.1.10 : RUPS Tahunan BPR BKK dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah	30
Gambar 3.1.11 : Audiensi dengan nasabah PD BKK Pringsurat	30
Gambar 3.1.12 : Konsultasi Percepatan Perubahan Perda PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ke OJK Pusat dan Kemendagri	31
Gambar 3.1.13 : Monitoring dan Evaluasi lapangan BLUD di berbagai Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah	31
Gambar 3.4.1 : Piagam Penghargaan Anugrah Adinata Syariah Tahun 2023 ...	34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

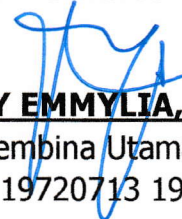
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024

Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Tengah



JULY EMYLIA, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP.: 19720713 199703 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi dimana laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Memberikan informasi kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
2. Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian saran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

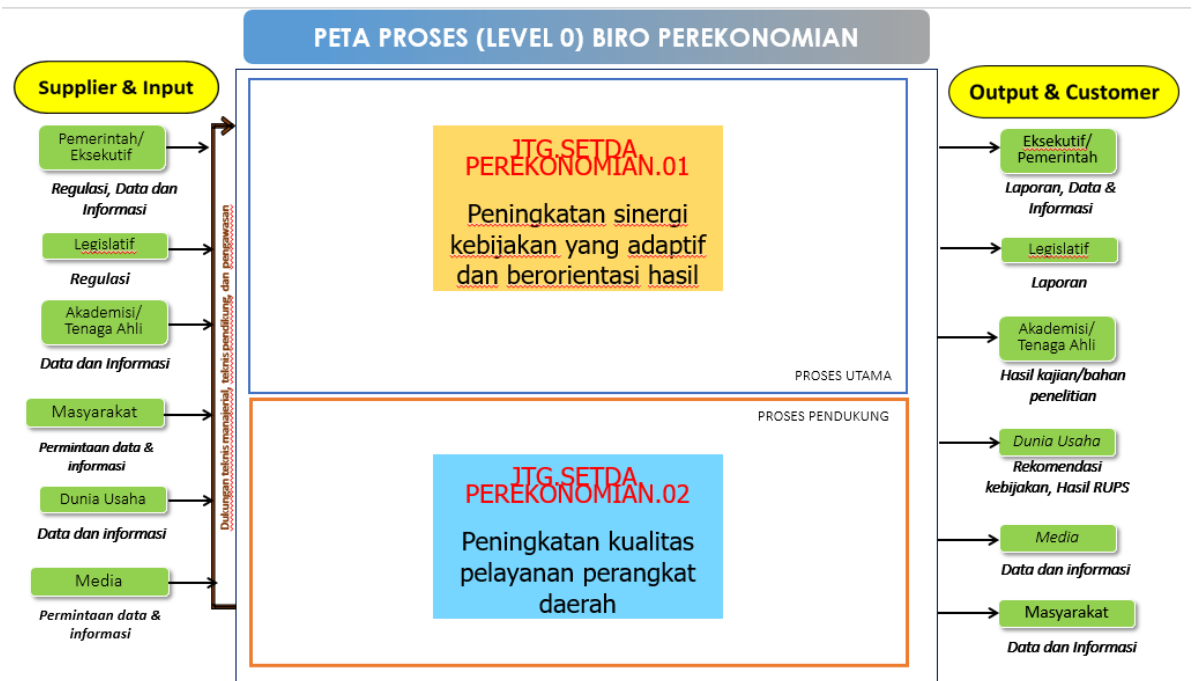
Mandat Kinerja pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 tertuang pada *cascading* kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN
1	2	3	11	12	14	16	17	19	20	21
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Indeks Kematangan kebijakan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan perekonomian makro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
							Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Perhubungan.		
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Ekonomi Mikro.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
							Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan.		

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN
1	2	3	11	12	14	16	17	19	20	21
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD Jasa Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
							Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan kebijakan BUMD Jasa Keuangan	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
				Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Aneka Usaha	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi serta kajian kebijakan pengembangan BUMD Aneka Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
							Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha			
				Persentase nilai kemandirian BLUD	Meningkatkan capaian kinerja BLUD		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
							Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN
1	2	3	11	12	14	16	17	19	20	21
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Biro Perekonomian Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Perekonomian

Sedangkan Peta Proses Bisnis Biro Perekonomian sebagai mana gambar berikut :



Gambar 1.2.1

Peta Proses Bisnis Biro Biro Perekonomian

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berada di bawah Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, yang membantu tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang Ekonomi Dan Pembangunan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN.

Sedangkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, terdiri atas:

1. Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
2. Bagian Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Bagian Perhubungan, Penanaman Modal Dan Pariwisata.

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2021 pada pasal 59 Biro Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata. Sedangkan pada pasal 60 Biro Perekonomian melaksanakan fungsi :

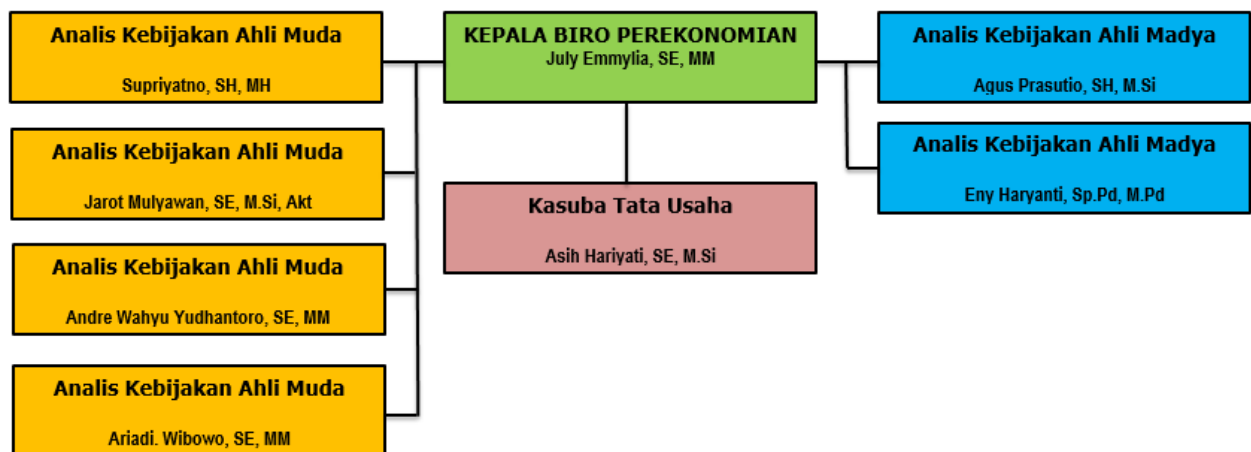
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
2. Pengoordinasi pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
4. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Sektor Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Kebijakan Ekonomi Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha

Milik Daerah serta Kebijakan Ekonomi Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.2.2 : Struktur Organisasi Biro Perekonomian

1.3 Isu – isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata pada tahun 2023, terdapat aspek-

aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Kualitas data kurang valid (urangnya kualitas data dan informasi dari stakeholder);
2. Adanya fraud (penyalahgunaan keuangan) yang terjadi di BUMD;
3. Kurang maksimalnya ketercapaian laba dari BUMD.

1.4 Kedudukan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran

Pada tahun 2023 sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berjumlah 41 pegawai yang secara rinci dapat dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 1.4.1

Data Pegawai Biro Perekonomian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan			
		SLTA	D3	S1	S2
1	Struktural	-	-	-	2
2	Pejabat Fungsional	-	-	-	6
3	JFU	4	7	14	6
4	Non PNS	-	-	2	-
	Jumlah	4	7	16	41

Tabel 1.4.2

Data Pegawai Biro Perekonomian Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	2
2	Pejabat Fungsional	6

No	Jabatan	Jumlah
3	JFU	31
4	Non PNS	2
Jumlah		41

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, selain didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya juga didukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sangat memadai yang pengelolaan dan tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana tersebut oleh Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Administrasi Umum dan Program Perekonomian Pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp.3.322.996.000,00.

1.5 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan maupun peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN ::

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Dalam Perjanjian Kinerja (PK) para Kepala Biro langsung bertanggungjawab kepada Sekda. Hal ini tidak sesuai dengan Pergub Jateng Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Setda Provinsi Jawa Tengah yang intinya menyampaikan bahwa Kepala Biro dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.	Dalam Perjanjian Kinerja (PK) untuk tahun 2023 masih bertanggung jawab kepada Sekda, akan tetapi Kepala Biro tetap bertanggungjawab kepada Asisten
2	Dalam rangka mengendalikan ketercapaian target kinerja tahunan, telah dibuat rencana aksi kinerja secara periodik dengan rincian kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja melalui aplikasi <i>e-controlling</i> namun hasilnya belum digunakan sebagai dasar <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Pada tahun 2023 ini pencapaian kinerja yang menggunakan aplikasi <i>econtrolling</i> belum menggunakan dasar <i>reward</i> dan <i>punishment</i>

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA OPD

1. Visi dan Misi

Upaya perwujudan visi - misi dan program kerja Gubernur menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.

Pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah terdapat Program Perekonomian Pembangunan, program tersebut mendukung misi Gubernur Jawa Tengah dalam memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tujuan Sekretariat Daerah terkait meningkatnya efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintaha daerah serta sasaran Sekretariat Daerah meningkatya sinergi kebijakan daerah.

2. Tujuan dan sasaran

Rencana Starategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sehingga Renstra yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018 – 2023 sesuai RPJMD Jawa Tengah.

Adapun tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1
RPJMD 2018 – 2023
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80	85	90	93	96
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	89	90	93	95
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	100	100	100	100

2.2. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah terdapat perubahan terkait nomenklatur Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, sehingga nomenklatur tersebut disesuaikan pada Renja Setda Tahun 2023. Tabel Renja Setda tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Renja 2018 - 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100

		a. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	86
		b. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	87
				Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	83,33
				Nilai kemandirian BLUD	%	55

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan dan koordinasi perekonomian	a. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan b. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	82 77

2	Meningkatnya laba BUMD	a. Tingkat kesehatan BUMD Aneka Usaha b. Tingkat kesehatan BUMD Jasa Keuangan	80 85
3	Meningkatnya kemandirian BLUD	Meningkatnya nilai kemandirian BLUD	55
4	Meningkatnya IKM Biro Perekonomian	Presentase capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100

Program :

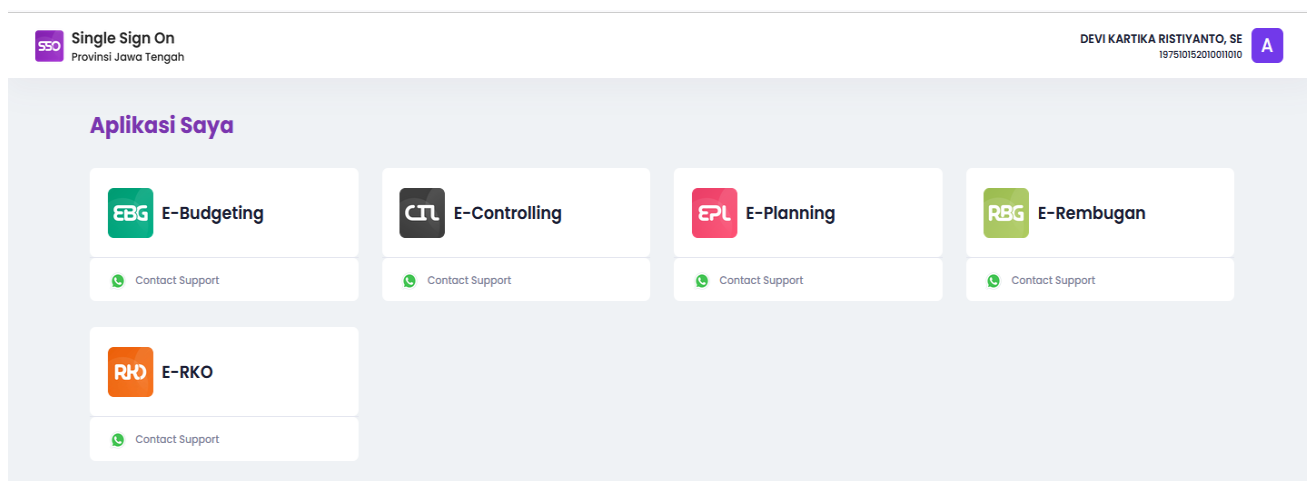
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Perekonomian Pembangunan | Anggaran Rp. 294.980.000,- |
| 2. Administrasi Umum | Anggaran Rp. 3.028.016.000,- |

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam hal pencapaian kinerja lingkup Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi perencanaan sampai pelaporan untuk mempermudah memonitoring, aplikasi tersebut dapat diakses secara online melalui *Single Sign On* Provinsi Jawa Tengah (sso.jatengprov.go.id). Berikut gambar yang menunjukkan aplikasi pendukung kinerja :

Gambar 2.4.1

Aplikasi Pendukung Kinerja



Keterangan : pada contoh diatas, gambar aplikasi tersebut merupakan aplikasi perencanaan sampai monitoring.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan, pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Sampai dengan akhir tahun 2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval atau skala nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	SKOR (%)
1	Sangat Baik	>91
2	Baik	76 – 90,99
3	Cukup	66 – 75,99
4	Kurang	51 – 65,99
5	Sangat Kurang	≤ 50,99

Sesuai Renstra Tahun 2018 - 2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan "Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah". Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Perekonomian selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) sasaran yaitu ::

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah;
2. Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hingga akhir tahun 2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian kinerja dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2023			Target Thn 2024
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan dan koordinasi perekonomian	a. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82	86	104,88	83
		b. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan		77	77	100	78
2	Meningkatnya laba BUMD	a. Tingkat kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	83,33	104,16	81
		b. Tingkat kesehatan BUMD Jasa Keuangan		85	87	102,35	85

3	Meningkatnya kemandirian BLUD	Meningkatnya nilai kemandirian BLUD	%	55	55	100	55
4	Meningkatnya IKM Biro Perekonomian	Presentase capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	100

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam aplikasi *e-controlling* yang secara periodik telah melaporkan hasil capaian kinerja setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Biro Perekonomian mempunyai 2 (dua) program dan 6 (enam) indikator kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Program Administrasi Umum							
1	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	Sangat Baik	Subbag TU
B. Program Perekonomian Pembangunan							
1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82	86	104,88	Sangat Baik	Bagian PPMP
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77	77	100	Sangat Baik	Bagian PPKU
3	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85	87	102,35	Sangat Baik	Bagian BUMD
4	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	83,33	104,16	Sangat Baik	Bagian BUMD
5	Nilai kemandirian BLUD	%	55	55	100	Sangat Baik	Bagian BUMD

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja pada Biro Perekonomian realisasi capainnya dikategorikan sangat baik yang dikarenakan seluruh realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Program/ Indikator Kinerja	2021 (%)			2022 (%)			2023 (%)		
		Target	Real	Cap	Target	Real	Cap	Target	Real	Cap
Program Administrasi Umum										
1	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Perekonomian Pembangunan										
1	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	NA	NA	NA	80	87,50	109,38	82	86	104,88
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	NA	NA	NA	75	75	100	77	77	100
3	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	NA	NA	NA	80	94,59	118,24	85	87	102,35
4	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	NA	NA	NA	75	85,71	114,28	80	83,33	104,16
5	Nilai kemandirian BLUD	NA	NA	NA	50	69,34	138,68	55	55	100

Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Perekonomian tahun 2022 - 2023 rata – rata capaiannya 100 %, sedangkan target maupun realisasi pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebelumnya nihil. Hal ini

dikarenakan indikator kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan indikator baru sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023 (%)	Target 2024 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan dan koordinasi perekonomian	a. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	82	83	101,2
		b. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	77	78	101,3
2	Meningkatnya laba BUMD	a. Tingkat kesehatan BUMD Aneka Usaha	80	81	101,3
		b. Tingkat kesehatan BUMD Jasa Keuangan	85	85	100
3	Meningkatnya kemandirian BLUD	Meningkatnya nilai kemandirian BLUD	55	55	100
4	Meningkatnya IKM Biro Perekonomian	Presentase capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja dengan target Akhir RPJMD

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	Tercapai
2	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	82	86	104,88	Tercapai
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian	77	77	100	Tercapai

		mikro yang diusulkan sebagai kebijakan				
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	85	87	102,35	Tercapai
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	80	83,33	104,16	Tercapai
		Nilai kemandirian BLUD	55	55	100	Tercapai

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Biro Perekonomian Tahun 2023 terhadap Target Akhir RPJMD rata - rata tercapai 100%. Hal ini dikarenakan capaian masing-masing indikator sasaran telah tercapai 100%.

Tabel 3.7
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi (%)	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1	Program Administrasi Umum	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	Dikarenakan hanya target 1 dokumen dan tercapai 1 dokumen	-
	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	82	86	104,88	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	77	77	100	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	85	87	102,35	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	80	83,33	104,16	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Nilai kemandirian BLUD	55	55	100	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja masing - masing indikator pada Biro Perekonomian Tahun 2023 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain tersusunnya

dokumen *Policy Brief*, rekomendasi kebijakan perekonomian makro dan mikro yang diusulkan sebagai kebijakan, Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha serta Nilai kemandirian BLUD.

Tabel 3.8
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja (%)			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100	100	100	294.980.000	294.187.093	99,73	0,27
2	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	82	86	104,88	480.000.000	479.014.700	99,79	0,21
3	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	77	77	100	715.000.000	713.907.377	99,85	0,15
4	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	73,33	75,11	102,17	1.833.016.000	1.341.625.868	73,19	26,81

Berdasarkan tabel 3.8 diatas disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.828.735.038,- (85,13%). Capaian realisasi anggaran ini turun 12,13 % dari tahun 2022 sebesar 97,48 %, hal ini dikarenakan pelaksanaan FGD dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Perubahan Perda Penyehatan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten serta Penyertaan Modal BUMD Provinsi Jawa Tengah yang direncanakan sebanyak 9 (sembilan) kali namun hanya terlaksana sebanyak 2 (dua) kali FGD atas permintaan Pansus DPRD Provinsi Jawa Tengah, sehingga honorarium narasumber tidak bisa dikeluarkan.

Tabel 3.9
Analisis program yang menunjang keberhasilan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/tidak
1	Program Perekonomian dan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	104,88	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	100	Menunjang
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	100		jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	100	Menunjang
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	102,35	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	100	Menunjang
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	104,16		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	100	Menunjang
		Nilai kemandirian BLUD	100		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja sasaran didukung oleh 2 (dua) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program, dengan hasil kegiatan antara lain:

1. Indikator program jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro



Gambar 3.1.1

FGD Sinergi Stakeholder Dalam Rangka Pemanfaatan Bandara Jenderal Soedirman Untuk Perjalanan Umrah di Wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen)



Gambar 3.1.2

FGD Penguatan Manajemen Pada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Era VUCA Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity)



Gambar 3.1.3

FGD "Sinergi Kawasan dan Industri Pariwisata Mendukung DPSP Borobudur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas di Jawa Tengah"
Bertempat di Setda Kab. Magelang
Tanggal 28 Februari 2023

2. Indikator program jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang ditunjang dengan sub kegiatan fasilitasi dan koordinasi bidang Koperasi, UKM dan LKM serta pelaksanaan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :



Gambar 3.1.4

Pengukuhan KDEKS oleh Bapak Wakil Presiden RI di Alun – Alun Masjid Agung Kauman Semarang



Gambar 3.1.5

Rakor dalam rangka Capacity Building TPID Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.1.6

Rapat Koordinasi Kegiatan Tahun 2023 dengan Dinas Koperasi dan UKM



Gambar 3.1.7

FGD Pengembangan & Inovasi Industri Halal Jawa Tengah di Tlogo Resort Tuntang.

3. Indikator program jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha



Gambar 3.1.8

Kunjungan lapangan terkait Pendirian BLUD

4. Indikator program jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan



Gambar 3.1.9

Pelaksanaan FGD percepatan perubahan Perda penyehatan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten



Gambar 3.1.10

RUPS Tahunan BPR BKK dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah



Gambar 3.1.11

Audiensi dengan nasabah PD BKK Pringsurat



Gambar 3.1.12

Konsultasi Percepatan Perubahan Perda PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten ke OJK Pusat dan Kemendagri

5. Indikator program jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD



Gambar 3.1.13

Monitoring dan Evaluasi lapangan BLUD di berbagai Rumah Sakit Provisi Jawa Tengah

3.2. Realisasi anggaran

Perkembangan pelaksanaan belanja operasi dan belanja modal APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berikut ini :

- 1) Pencapaian indikator sasaran Efektifitas kebijakan perekonomian daerah menggunakan anggaran sebesar Rp. 294.187.093,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 294.980.000,- realisasi anggaran sebesar 99,73 %. Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,27% atau sebesar Rp.792.907,-
- 2) Pencapaian indikator sasaran Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian menggunakan anggaran senilai Rp. 1.192.922.077,- dari alokasi anggaran Rp. 1.195.000.000,- realisasi anggaran 99,83 % Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,17 % atau sebesar Rp.2.077.923,-.
- 3) Pencapaian indikator sasaran Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dengan anggaran senilai Rp. 1.341.625.868,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 1.833.016.000,- realisasi anggaran 73,19 % sehingga terdapat efisiensi sebesar 26,81 % atau sebesar Rp. 491.390.132,-
- 4) Efisiensi anggaran sebesar 14,87 % atau senilai Rp.494.260.962,-.

Pencapaian indikator sasaran menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.828.735.038,- atau 85,13 % dari total pagu Rp. 3.322.996.000,-. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar (14,87) % atau sebesar Rp. 494.260.962,-. Efisiensi ini dari honorarium yang tidak dikeluarkan dikarenakan pelaksanaan FGD dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk Perubahan Perda Penyehatan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten serta Penyertaan Modal BUMD Provinsi Jawa Tengah yang direncanakan sebanyak 9 (sembilan) kali hanya terlaksana sebanyak 2 (dua) kali FGD.

Tabel 3.10
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	294.980.000	294.187.093	99,73
2	Program Perekonomian Pembangunan	3.028.016.000	2.534.547.945	83,70
	Jumlah	3.322.996.000	2.828.735.038	85,13

3.3. INOVASI

Pada tahun 2023 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah menyusun inovasi baru untuk mengetahui jumlah arus mudik baik pada angkutan umum maupun penumpang yang masuk dan melawati Jawa Tengah yaitu DARI RANTAU.

3.4. PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 Biro Perekonomian telah memperoleh penghargaan Anugrah Adinata Syariah Tahun 2023 pada tanggal 26 Mei 2023 yang disampaikan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin berupa :

1. Juara 4 Kategori Program Inovasi pada sektor Ekonomi Syariah
2. Juara 5 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren



Gambar 3.4.1
Paigam Penghargaan Anugrah Adinata Syariah Tahun 2023

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata dan berfungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan pada masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sasaran tahun sebelumnya, maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Perekonomian dikategorikan pencapaian kerjanya SANGAT BAIK sebagaimana olah data

Hasil pengukuran masing- masing capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan dengan capaian 104,88 %, Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan dengan capaian 100 %, Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan dengan capaian 102,35 %, Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha dengan capaian 104,16 % dan Nilai kemandirian BLUD dengan capaian 100 %. Hasil capaian realisasi anggaran Sangat Baik atau 85,13%.

4.2. Rekomendasi

Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya akan lebih


mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	83%
2	Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	78%
3	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	85%
4	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Aneka Usaha	81%
5	Meningkatkan capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	55%
6	Meningkatkan kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100%

Semarang, 19 Juni 2023



 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 JULY EMMYLIA, SE, MM
 Pembina/Tingkat I
 NIP. 19720713 199703 2 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Koordinator Bagian PPMP

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, SE, MM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

KOORDINATOR BAGIAN PPMP


EDDY S BRAMIYANTO, SE, MM


ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

Pembina Tk. I

NIP. 19660611 198602 1 001

NIP. 19640909 198812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian (Makro)	a. Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro bidang Penanaman Modal dan Pariwisata b. Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan perhubungan	2 Dokumen 2 Dokumen

Kegiatan
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian (Makro)

Anggaran
Rp. 480.000.000,-
Keterangan
APBD

Semarang, 9 Januari 2023

KOORDINATOR BAGIAN PPMP

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SETDA
EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001

ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640909 198812 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS PRASUTIO, SH, M,Si

Jabatan : Koordinator Bagian BUMD

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO,SE,MM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH


EDDY S BRAMIYANTO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660611 198602 1 001

KOORDINATOR BAGIAN BUMD


AGUS PRASUTIO, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690726 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



Unit Kerja : Bagian BUMD

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemandirian BLUD	a. Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD b. Jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	2 Dokumen 2 Dokumen
2	Meningkatnya Laba BUMD	a. Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha b. Jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha c. Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD Jasa Keuangan d. Jumlah dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Anggaran Keterangan
Rp. 1.850.000.000,- APBD

Semarang, 9 Januari 2023

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



 * EDDY S BRAMIYANTO, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660611 198602 1 001

COORDINATOR BAGIAN BUMD


 AGUS PRASUTIO, SH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690726 199003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMAR USTADI ABDULLAH, SE

Jabatan : Koordinator Bagian PPKU

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, SE, MM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH


EDDY S BRAMIYANTO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660611 198602 1 001

KOORDINATOR BAGIAN PPKU


AMAR USTADI ABDULLAH, SE

Penata Tk. I

NIP. 19820110 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian (Mikro)	a. Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro bidang Koperasi dan UKM b. Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen 3 Dokumen

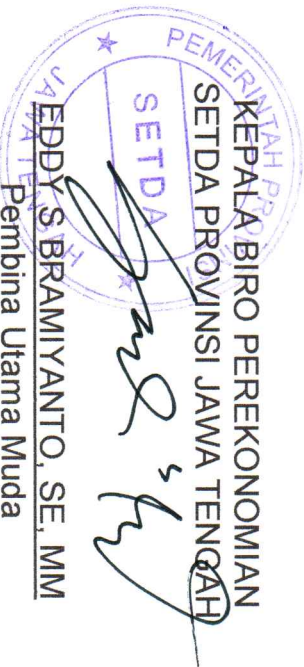
Kegiatan
Pengelolaan Kebijakan dan
Koordinasi Perekonomian (Mikro)

Anggaran
Rp. 715.000.000,-

Keterangan
APBD

Semarang, 9 Januari 2023

KOORDINATOR BAGIAN PPKU



EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001

AMAR USTADI ABDULLAH, SE
Penata Tk. I
NIP. 19820110 200604 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIYATNO, SH, MH
Jabatan : Sub Koordinator Bagian Koperasi dan UKM Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AMAR USTADI ABDULLAH, SE
Jabatan : Koordinator Bagian PPKU Analis Kebijakan Ahli Madya
selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KOORDINATOR BAGIAN PPKU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

SUB KOORDINATOR BAGIAN KOPERASI DAN UKM
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

AMAR USTADI ABDULLAH, SE
Penata Tk. I
NIP. 19820110 200604 1 010

SUPRIYATNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19660910 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertaksananya Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Bidang Koperasi dan UKM)	Jumlah Fasilitas pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro (Bidang Koperasi dan UKM)	4 Laporan

Kegiatan

Anggaran

1. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Bidang Koperasi dan UKM)


Rp. 330.000.000,-

Keterangan

APBD

Semarang, 9 Januari 2023


PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN,
PENANAMAN MODAL DAN
PARAWISATA
AMAR USTADIA ABDULLAH, SE
Penata Tk. I
NIP. 19820110 200604 1 010

SUB KOORDINATOR BAGIAN KOPERASI DAN UKM
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SUPRIYATNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19660910 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASIH HARIYATI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, SE, MM
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


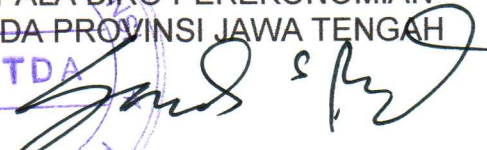
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SETDA

EDDY S BRAMIYANTO, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



ASIH HARIYATI, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19821211 200604 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Sub Bagian Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dankonsultasi kedalam dan luar daerah Biro Perencanaan	12 Bulan
2	Terlaksananya penatausahaan arsipdinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Perencanaan	12 Bulan

Kegiatan

- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Anggaran
Rp. 259.980.000,- | Keterangan
APBD |
| 2. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Rp. 35.000.000,- | APBD |

Semarang, 9 Januari 2023

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



ASIH HARIYATI, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19821211 200604 2 009



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDRO WICAKSA, S.Si.T, MBM

Jabatan : Sub Koordinator Bagian Perindag Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AMAR USTADI ABDULLAH, SE

Jabatan : Koordinator Bagian PPKU Analis Kebijakan Ahli Madya
selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KOORDINATOR BAGIAN PPKU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

SUB KOORDINATOR BAGIAN PERINDAG
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


AMAR USTADI ABDULLAH, SE


ENDRO WICAKSA, S.Si.T, MBM

Penata Tk. I

Pempina

NIP. 19820110 200604 1 010

NIP. 19800920 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksanannya Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Bidang Perindag)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan	4 Laporan

Kegiatan

Anggaran

1. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Bidang Perindag)

Rp. 385.000.000,-

Keterangan

APBD

Semarang, 9 Januari 2023

KOORDINATOR BAGIAN PPKU
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA



AMAR USTADI ABDULLAH, SE

Penata Tk. I

NIP. 19820110 200604 1 010

SUB KOORDINATOR BAGIAN PERINDAG
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

ENDRO WICAKSA, S.Si.T. MBM

Pembina

NIP. 19800920 200112 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAROT MULYAWAN, SE,M.Si,Akt
Jabatan : Sub Koordinator Bagian BUMD Bidang Keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUS PRASUTIO, SH, M,Si
Jabatan : Koordinator Bagian BUMD
selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KOORDINATOR BAGIAN BUMD
AGUS PRASUTIO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690726 199003 1 002


SUB KOORDINATOR
BAGIAN BUMD BIDANG KEUANGAN
JAROT MULYAWAN, SE, M.Si, Akt
Penata Tk. I
NIP. 19750206 200903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Keuangan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	a. Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaa b. Jumlah Fasilitas Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	2 Laporan 4 Laporan
2	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	2 Laporan
3	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Fasilitas Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	4 Laporan


Sub kegiatan

- | | Anggaran | Keterangan |
|---|---------------------|------------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Rp. 300.000.000,- | APBD |
| 2. Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan | Rp. 150.000.000,- | APBD |
| 3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Rp. 1.300.000.000,- | APBD |


Semarang, 9 Januari 2023



PEMERINTAH PROVINSI SEMARANG
KOORDINATOR BAGIAN BUMD
SETDA


AGUS PRASUTYO, SH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690726 199003 1 002

SUB KOORDINATOR
BAGIAN BUMD BIDANG KEUANGAN


JAROT MULYAWAN, SE, M.Si, Akt
 Penata Tk. I
 NIP. 19750206 200903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Koordinator Bagian PPMP

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : WAHYU JAYA SEMBODO, SE, MM

Jabatan : Sub Koordinator Sub Bagian PMP

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KOORDINATOR BAGIAN PPMP

SUB KOORDINATOR SUB BAGIAN PMP


ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19640909 198812 2 001


WAHYU JAYA SEMBODO, SE, MM

Penata Tk. I

NIP. 19690202 200501 1012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kasubag Penanaman Modal dan Pariwisata

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro (Penanaman Modal dan Pariwisata)	Jumlah dokumen Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro (Penanaman Modal dan Pariwisata)	4 Laporan

Sub Kegiatan
Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Penanaman Modal dan
Pariwisata)

Anggaran
Rp. 260.000.000,-

Keterangan
APBD

Semarang, 9 Januari 2023

KOORDINATOR BAGIAN PPMP

SUB KOORDINATOR SUB BAGIAN PMP



ENY HARYANTI, S.Pd. M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640909 198812 2 001

WAHYU JAYA SEMBODO, SE. MM

Penata Tk. I
NIP. 19690202 200501 1012



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Koordinator Bagian PPMP

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : ARIADI WIBOWO, SE, MM

Jabatan : Sub Koordinator Sub Bagian Perhubungan

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,


KOORDINATOR BAGIAN PPMP
ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640909 198812 2 001

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR SUB BAGIAN PERHUBUNGAN

ARIADI WIBOWO, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19831015 201001 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kasubag Penanaman Modal dan Pariwisata

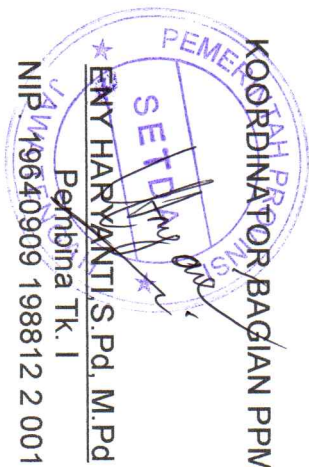
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Bidang Perhubungan)	Jumlah Fasilitas pelaksanaan kebijakan Perhubungan	4 Laporan

Sub Kegiatan
Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Bidang Perhubungan)
Anggaran
Rp. 220.000.000,-
Keterangan
APBD

Semarang, 9 Januari 2023

KOORDINATOR BAGIAN PPMP

SUB KOORDINATOR SUB BAGIAN PERHUBUNGAN



ENY HARYANTI, S.Pd, M.Pd
Perbina Tk. I
NIP. 19640909 198812 2 001

ARIADI WIBOWO, SE. MM
Penata Tk. I
NIP. 19831015 201001 1 020



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax.
8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRE WAHYU YUDHANTO, SE, MM
Jabatan : Sub Koordinator Bagian BUMD Bidang Jasa Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AGUS PRASUTIO, SH, M,Si
Jabatan : Koordinator Bagian BUMD
selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

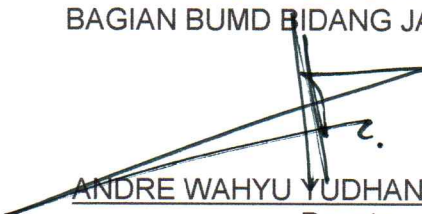
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


KOORDINATOR BAGIAN BUMD
AGUS PRASUTIO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690726 199003 1 002

SUB KOORDINATOR
BAGIAN BUMD BIDANG JASA PRODUKSI

ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE,MM
Penata
NIP. 19851029 201012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Jasa Produksi

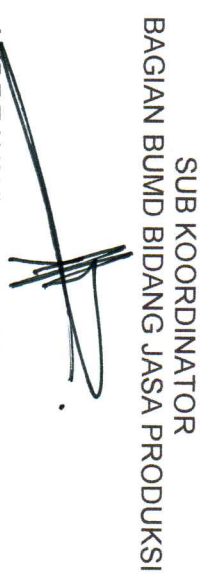
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan BLUD	2 Laporan
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Fasilitas Monev Pelaporan BLUD	4 Laporan

- Sub kegiatan
- | | | |
|---|------------------|--------------------|
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan | Rp. 50.000.000,- | Keterangan
APBD |
| 2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Rp. 50.000.000,- | APBD |

Semarang, 9 Januari 2023



AGUS PRASUTYO, SH, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19690726 199003 1 002

SUB KOORDINATOR
BAGIAN BUMD BIDANG JASA PRODUKSI

ANDRE WAHYU YUDHANTORO, SE, MM
 Penata
 NIP. 19851029 201012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, SE, MM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

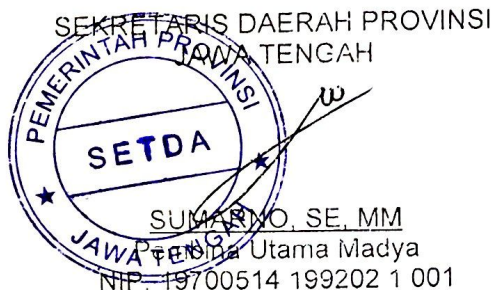
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	a. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan b. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	82 % 77 %
2	Meningkatnya laba BUMD	a. Tingkat kesehatan BUMD aneka usaha b. Tingkat kesehatan BUMD Jasa Keuangan	80 % 85 %
3	Meningkatnya Kemandirian BLUD	Meningkatnya nilai kemandirian BLUD	55 %
4	Meningkatnya IKM Biro Perekonomian	Presentase capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100%

Program

1. Perekonomian Pembangunan
2. Administrasi Umum

Anggaran

- Rp. 3.045.000.000,-
Rp. 294.980.000,-

Keterangan

- APBD
APBD

Semarang, 9 Januari 2023



KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Telepon (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 83111266
kodepos 50243 <http://www.jatengprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULY EMMYLIA, SE, MM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM

Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 7 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

JULY EMMYLIA, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720713 199703 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan dan koordinasi perekonomian	a. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan b. Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	82 % 77 %
2	Meningkatnya laba BUMD	a. Tingkat kesehatan BUMD Aneka Usaha b. Tingkat kesehatan BUMD Jasa Keuangan	80 % 85 %
3	Meningkatnya kemandirian BLUD	Meningkatnya nilai kemandirian BLUD	55 %
4	Meningkatnya IKM Biro Perekonomian	Presentase capaian administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	100%

Program

1. Perekonomian Pembangunan
2. Administrasi Umum

Anggaran

Rp. 3.028.016.000,-
Rp. 294.980.000,-

Keterangan

APBD
APBD

Semarang, 7 November 2023

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



(Signature)
JULY EMMYLIA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199703 2 005